



ANALISIS KETIDAKLENGKAPAN REPRESENTASI SEJARAH DAYAK KALTENG PADA BUKU TEKS SEJARAH RESMI SMA/SMK KURIKULUM MERDEKA

Sumiatie¹, Yudi Susanto², Nuryuana Dwi Wulandari³
Universitas PGRI Palangka Raya^{1,2}, IKIP PGRI Wates³

Email: sumiatie@uppraya.ac.id, yudisusanto@uppraya.ac.id,
nuryuanadwiwulandari@ipw.ac.id

Abstract

This study critically examines the representation of Central Kalimantan Dayak history in the Indonesian national history curriculum, with particular attention to the structural mechanisms through which local historiography is marginalized in officially sanctioned educational texts. Drawing on critical discourse analysis (CDA) grounded in Fairclough's three-dimensional framework and the theoretical constructs of hidden curriculum and epistemic justice, the study conducts a systematic textual analysis of national history textbooks published under Curriculum 2013 and the Merdeka Curriculum for secondary school levels. Primary data consist of direct textual excerpts from these textbooks, analyzed for narrative positioning (subject versus object), lexical choices, active-passive constructions, and the visual-representational imbalances across regional identities. Secondary data consist of peer-reviewed academic literature on Dayak historiography and curriculum policy. Findings reveal that Dayak representation is systematically fragmentary and instrumental, Dayak communities appear predominantly as illustrative objects of national cultural diversity rather than as autonomous historical agents. This pattern constitutes a form of epistemic injustice embedded within curriculum architecture. The study argues that authentic curricular reform requires explicit integration of local historiography as an epistemically equal component of the national narrative, and offers a framework for such integration within the Merdeka Curriculum's muatan lokal mechanism..

Keywords: *History Education, Dayak Historiography, Epistemic Justice, Critical Discourse Analysis, Textbook Analysis*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis representasi sejarah Dayak Kalimantan Tengah dalam kurikulum sejarah nasional Indonesia, dengan perhatian khusus pada mekanisme struktural yang memarginalisasi historiografi lokal dalam teks pendidikan resmi. Bertumpu pada analisis wacana kritis (CDA) berbasis kerangka tiga dimensi Fairclough serta konstruk teoretis hidden curriculum dan keadilan epistemik, penelitian ini melaksanakan analisis tekstual sistematis terhadap buku teks sejarah nasional terbitan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka untuk jenjang sekolah menengah. Data primer berupa kutipan tekstual langsung dari buku teks yang dianalisis berdasarkan posisi naratif (subjek versus objek), pilihan leksikal, konstruksi aktif-pasif, serta ketidakseimbangan representasi visual antardaerah. Data sekunder terdiri atas literatur akademis tentang historiografi Dayak dan kebijakan kurikulum. Temuan menunjukkan bahwa representasi Dayak secara sistematis bersifat



fragmentaris dan instrumentalis, komunitas Dayak hadir terutama sebagai objek ilustratif keragaman budaya nasional, bukan sebagai agen historis yang otonom. Pola ini merupakan bentuk ketidakadilan epistemik yang tertanam dalam arsitektur kurikulum. Penelitian berpendapat bahwa reformasi kurikuler yang autentik mensyaratkan integrasi eksplisit historiografi lokal sebagai komponen yang setara secara epistemik dalam narasi nasional, dan menawarkan kerangka integrasi tersebut melalui mekanisme muatan lokal Kurikulum Merdeka.

Kata kunci: Pendidikan Sejarah, Historiografi Dayak, Keadilan Epistemik, Analisis Wacana Kritis, Analisis Buku Teks.

PENDAHULUAN

Pendidikan sejarah, sebagai arena institusional pembentukan memori kolektif, tidak hanya mentransmisikan fakta masa lalu, tetapi secara aktif mengonstruksi representasi tentang subjek-subjek yang dianggap sebagai pembangun peradaban. Pendidikan sejarah di Indonesia secara struktural masih didominasi oleh narasi nasionalistik dan jawasentris yang secara sistematis meminggirkan sejarah daerah serta masyarakat *indigenous*, termasuk Dayak Kalimantan Tengah. Tokoh asal Kalimantan hanya menempati 5% representasi dalam buku teks resmi, sementara tokoh asal Jawa mendominasi dengan proporsi jauh lebih besar (Gemilang et al., 2024; Rahmadani & Aisiah, 2024).

Ketimpangan ini perlu dikaji secara kritis mengingat Kurikulum Merdeka secara eksplisit menekankan fleksibilitas, integrasi kearifan lokal, dan pendidikan multikultural sebagai fondasi pembentukan identitas kolektif yang inklusif. Representasi sejarah yang tidak lengkap dan bias secara ideologis berpotensi melanggengkan ketidakadilan simbolik yang mengikis kebanggaan kultural siswa Dayak dan menghambat kohesi sosial di masyarakat majemuk (Purwanta, 2023; Silva & Silva, 2025). Penelitian ini dirancang untuk menguji secara



empiris sejauh mana buku teks resmi SMA telah merealisasikan mandat inklusivitas kurikulum terbaru, sekaligus menjawab tantangan pelestarian memori kolektif yang berkeadilan epistemik.

Ketidakseimbangan representasi dalam buku teks sejarah Indonesia telah terdokumentasi secara konsisten dalam berbagai kajian terdahulu. Literatur menunjukkan dominasi narasi Jawasentris yang secara sistematis meminggirkan historiografi komunitas adat di luar Jawa. Purwanta (2012), melalui analisis isi buku teks SMA periode 1975–2008, menemukan bahwa konstruksi wacana identitas nasional cenderung mengadopsi perspektif tunggal yang berpusat pada kekuasaan negara (Purwanta, 2012). Temuan serupa muncul dalam kajian Kurikulum 2013 oleh Syahrman dan Mulyana (2021), yang mengungkapkan bahwa integrasi nilai multikulturalisme lebih bersifat dekoratif daripada substantive (Syahrman & Mulyana, 2021). Bahkan pada Kurikulum Merdeka, Laksitanto dan Pelu (2026) mencatat bahwa narasi budaya dominan tetap mendominasi buku teks kelas XI, sementara representasi kelompok minoritas terpinggirkan (Laksitanto & Pelu, 2026). Data kuantitatif dari Rahmadani dan Aisiah (2024) memperkuat temuan ini, tokoh asal Jawa menempati 58% representasi dalam buku teks Sejarah Indonesia Kurikulum Merdeka kelas XI, sedangkan Kalimantan hanya memperoleh porsi 5% (Rahmadani & Aisiah, 2024).

Kajian-kajian tersebut berhasil memetakan ketimpangan representasi secara umum, tetapi tiga celah mendasar dalam literatur belum terjawab. Pertama, analisis terhadap buku teks Kurikulum Merdeka cenderung terfragmentasi pada satu jenjang kelas tertentu, sehingga pemetaan narasi yang berkesinambungan dari periode praaksara (Kelas X) hingga era kontemporer (Kelas XII) belum tersedia. Kedua, penelitian mengenai sejarah lokal Kalimantan Tengah, seperti



studi Baddak et al. (2019) tentang Huma Betang Tumbang Anoi (Baddak et al., 2019), Ningrum dan Soebijantoro (2023) mengenai ritual Tiwah (Ningrum & Soebijantoro, 2023), serta Hartati (2018) tentang pembelajaran berbasis peristiwa local (Hartati, 2018), umumnya berfokus pada upaya guru menyisipkan materi muatan lokal secara mandiri. Kajian-kajian ini belum mengkritisi secara sistematis sejauh mana buku teks resmi pemerintah telah menyediakan ruang struktural bagi identitas Dayak. Ketiga, hingga saat ini belum ada penelitian yang menguji secara empiris apakah klaim "fleksibilitas" dalam Kurikulum Merdeka mampu mengurangi bias Jawasentrisme dalam narasi sejarah nasional resmi, khususnya terkait komunitas Dayak Kalimantan Tengah.

Kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas implementasi mempertegas urgensi penelitian ini. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan ruang bagi integrasi narasi lokal secara substantif dan mendorong pendidikan multikultural, tetapi praktik pembelajaran sejarah di lapangan masih bersifat sporadis, fragmentaris, dan sangat bergantung pada inisiatif individual guru akibat rigiditas struktural dalam produksi buku teks nasional (Bhaskara, 2024; Chalimi, 2024). Kearifan lokal Dayak sering kali hanya disinggung secara simbolis tanpa kedalaman historis, sementara bias androsentris dan warisan ideologis Orde Baru yang militeristik tetap lestari (Azifambayunasti et al., 2022; Darmawan & Mulyana, 2019; Kristianus, 2022; Wurdianto et al., 2022). Upaya dekolonisasi kurikulum belum menyentuh perubahan mendasar pada konten ajar. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis secara komprehensif konstruksi naratif, pola wacana, dan implikasi epistemik representasi sejarah Dayak Kalimantan Tengah dalam buku teks resmi Kurikulum Merdeka,



sekaligus menguji kesenjangan antara mandat inklusivitas kurikulum dan realitas tekstual yang tersedia.

Penelitian ini difokuskan pada tiga persoalan utama yang saling berkait. Pertama, bagaimana posisi naratif komunitas Dayak Kalimantan Tengah dikonstruksi secara linguistik dalam ketiga buku teks Sejarah Indonesia Kemendikbudristek (2021–2022) untuk kelas X, XI, dan XII. Kedua, pola wacana ideologis apa yang dapat diidentifikasi dalam representasi Kalimantan dan komunitas Dayak pada bab-bab keanekaragaman budaya, perlawanan kolonialisme, dan integrasi nasional. Ketiga, implikasi epistemik apa yang dapat diturunkan dari pola representasi tersebut terhadap pembentukan kesadaran historis siswa Dayak, serta rekomendasi apa yang dapat dirumuskan untuk integrasi historiografi lokal Dayak dalam mekanisme muatan lokal Kurikulum Merdeka.

Penelitian ini membedakan diri dari kajian terdahulu melalui empat celah yang diidentifikasi secara eksplisit. Regulasi Kurikulum Merdeka mewajibkan integrasi kearifan daerah, namun buku teks resmi belum mengoperasionalkan mandat ini secara terukur untuk sejarah Dayak Kalteng. Studi sebelumnya cenderung terfragmentasi atau menganalisis kurikulum lama, sementara penelitian ini secara spesifik menyoroti tiga buku teks terkini dengan fokus pada konstruksi linguistik lintas jenjang. Literatur yang ada sering memisahkan analisis wacana, kurikulum tersembunyi, dan keadilan epistemik, penelitian ini mengintegrasikan ketiganya untuk mengungkap bahwa ketimpangan representasi bukan sekadar kesalahan konten, melainkan bentuk ketidakadilan struktural dalam produksi pengetahuan sejarah. Kajian ini juga membongkar paradigma sejarah sebagai alat nation-building yang sentralistik menuju paradigma dekolonial dan pluralis yang menempatkan *agency* lokal sebagai fondasi kebenaran historis. Keaslian



penelitian ini terletak pada integrasi kerangka *hidden curriculum* (Apple, 2004) dengan konsep *epistemic injustice* (Fricker, 2007), suatu sintesis yang belum dilakukan secara eksplisit dalam literatur pendidikan sejarah Indonesia. Penelitian ini menerapkan *Critical Discourse Analysis* (CDA) tiga dimensi Fairclough secara lintas jenjang dengan fokus pada representasi etnik non-dominan, melampaui pendekatan analisis isi konvensional. Hasil penelitian dirancang tidak hanya berhenti pada kritik tekstual, melainkan menawarkan kerangka berbasis kebijakan untuk integrasi historiografi lokal Dayak ke dalam mekanisme muatan lokal Kurikulum Merdeka.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, bias jawasentris dan hegemoni wacana nasional akan terus terekam dan direproduksi sebagai "kebenaran" resmi di ruang kelas. Siswa Dayak Kalimantan Tengah berisiko mengalami *epistemic injustice* dan erosi identitas kolektif, sementara guru dan pembuat kebijakan kehilangan pijakan empiris untuk merancang muatan lokal yang autentik. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga mendesak secara sosial-politik untuk memastikan bahwa narasi sejarah nasional memeluk seluruh keragaman pengalaman historis nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain analisis wacana kritis (*critical discourse analysis/CDA*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan hanya mendeskripsikan frekuensi kemunculan konten, tetapi mengungkap struktur ideologis yang mendasari pilihan representasi dalam teks kurikulum (Fauzan, 2018). CDA memungkinkan peneliti bergerak dari tataran linguistik, yaitu bagaimana sesuatu dikatakan, menuju tataran



ideologi, yaitu mengapa sesuatu dikatakan dengan cara tertentu dan bukan cara lain. Buku teks sejarah bukan kumpulan fakta yang direkam secara pasif, tapi artefak pedagogis yang mengonstruksi versi tertentu dari masa lalu untuk tujuan sosiopolitik (Maksum, 2015). CDA dalam tradisi Fairclough menyediakan kerangka metodologis yang memadai karena teks tidak dapat dipisahkan dari konteks produksi dan konsumsinya yang bersifat sosial dan politis.

Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah tiga buku teks Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Pusat Perbukuan dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan: (1) *Sejarah untuk SMK Kelas X*, karya Sari Oktafiana, cetakan pertama 2021, ISBN 978-602-244-555-5, xii + 92 halaman, (2) *Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI*, karya Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Zein Ilyas, cetakan pertama 2021, ISBN 978-602-244-858-7, xvi + 200 halaman, dan (3) *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII*, karya Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Aan Ratmanto, cetakan pertama 2022, ISBN 978-602-427-964-6, xxviii + 228 halaman. Ketiga buku ini merupakan buku teks resmi dalam kerangka Kurikulum Merdeka yang digunakan secara nasional.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi sistematis dengan penelusuran halaman demi halaman pada ketiga buku teks yang dijadikan objek penelitian. Unit analisis ditetapkan sebagai segmen teks berupa kalimat atau paragraf, serta elemen visual berupa gambar, foto, atau ilustrasi beserta keterangannya, yang secara eksplisit menyebut atau dapat diatribusikan kepada Dayak, Kalimantan, Kalimantan Tengah, atau istilah-istilah kontekstual terkait seperti suku, adat-istiadat, dan kearifan lokal. Penentuan sampel



menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dua kriteria inklusi: (a) bab atau subbab yang secara eksplisit membahas keanekaragaman budaya, sejarah regional, perlawanan terhadap kolonialisme, dan pembentukan NKRI, serta (b) segmen teks yang menyebut Dayak, Kalimantan, atau entitas sejarah Kalimantan. Sumber data sekunder terdiri atas literatur akademis tentang historiografi Dayak Kalimantan Tengah dan artikel jurnal pendidikan sejarah yang terindeks.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yang sesuai dengan kerangka tiga dimensi CDA Fairclough. Pada level mikro (linguistik), setiap unit analisis dikode berdasarkan: (a) posisi naratif, yaitu Subjek aktif (S), Objek pasif (O), atau Latar belakang (L), (b) konstruksi kalimat, yaitu Aktif (A), Pasif (P), atau Deskriptif tanpa agen jelas (D), serta (c) konteks kemunculan, yaitu Bab Keanekaragaman Budaya (KB), Perlawanan Kolonial (PK), Integrasi Nasional (IN), atau Sejarah Lokal/Regional (SL). Pada level meso (praktik diskursif), analisis difokuskan pada cara teks diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks kebijakan kurikulum nasional. Pada level makro (konteks sosiokultural), pola-pola yang ditemukan diinterpretasikan dalam kerangka teori *hidden curriculum* dan keadilan epistemik. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan tekstual dengan sumber historiografi lokal Dayak yang valid secara akademis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Naratif Komunitas Dayak Kalimantan Tengah

Analisis terhadap ketiga buku teks sampel, yaitu Sejarah untuk SMK Kelas X (Oktafiana, 2021), Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI (Safitry et al., 2021), dan Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII (Safitry et

al., 2022), menghasilkan temuan yang menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang konstruksi posisi naratif komunitas Dayak. Temuan yang paling menonjol adalah ketiadaan total kata kunci "Dayak" dari ketiga buku teks tersebut. Istilah ini tidak ditemukan dalam narasi utama di ketiga jenjang kelas. Demikian pula dengan istilah sub-etnik seperti "Ngaju," "Bakumpai," "Katingan," dan "Ma'anyan," serta nama provinsi "Kalimantan Tengah." Kondisi ini bukan sekadar persoalan representasi yang minim, melainkan ketiadaan yang bersifat absolut dan sistemis, dan merupakan temuan empiris utama dalam penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Koding Analisis Buku Teks Sejarah Kelas X

No.	Halaman - Bab/Subbab	Kutipan Verbatim	Koding	Catatan Konteks
1	Hal. 18 - Kisah 4: Sejarah Lokal	"Penggunaan alat musik beduk selanjutnya berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat."	L D SL	Kalimantan Barat sebagai latar geografis persebaran budaya, satu-satunya penyebutan Kalimantan di buku kelas X.
2	Hal. 36 - Sinkronis	"...menjelaskan perubahan sosial pada masyarakat Suku Tengger di Jawa Timur."	O D KB	Suku bangsa sebagai objek, kajian metode sinkronis, contoh eksklusif dari Jawa.
3	Hal. 45 - Sinkronis	"...situasi dan kondisi budaya, suku dan tradisi suatu masyarakat, atau situasi dan kondisi sosial tentang keragaman sosial masyarakat..."	L D KB	Suku dan tradisi sebagai variabel analisis sinkronis, bersifat abstrak tanpa contoh Kalimantan.
4	Hal. 46 - Sinkronis	"...dapat kalian jelaskan berdasarkan	L D KB	Adat-istiadat sebagai variabel latar, tidak ada

No.	Halaman - Bab/Subbab	Kutipan Verbatim	Koding	Catatan Konteks
		kondisi ekonomi, adat-istiadat, struktur sosial, komposisi penduduk..."		contoh spesifik dari Kalimantan.
5	Hal. 70 - Kisah Inspiratif	"Sasi adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat di Maluku dan Papua Barat untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam..."	S P SL	Masyarakat adat sebagai subjek aktif, namun contoh eksklusif dari Maluku, tidak ada padanan dari Kalimantan.

Sumber: Analisis langsung terhadap buku teks (Oktafiana, 2021)

Kata "Kalimantan" hanya disebut satu kali dalam buku kelas X, yaitu sebagai latar geografis persebaran alat musik beduk pada halaman 18, "Penggunaan alat musik beduk selanjutnya berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat." Secara linguistik, kalimat ini memposisikan Kalimantan Barat dalam fungsi gramatikal keterangan tempat (*adjunct of place*), bukan sebagai agen atau objek naratif yang memiliki keagenan historis. Frasa "termasuk di Kalimantan Barat" ditempatkan di akhir kalimat sebagai perluasan daftar geografis, yang dalam analisis CDA menandai relasi inklusi periferis, wilayah tersebut diakui eksistensinya tetapi dikecualikan dari posisi naratif sentral. Penyebutan ini terkode sebagai L|D|SL (Latar/Deskriptif/Sejarah Lokal), yang berarti Kalimantan hadir semata sebagai salah satu titik dalam peta persebaran budaya yang lebih luas, bukan sebagai komunitas yang memproduksi atau mewariskan tradisi tersebut.

Pembahasan keanekaragaman budaya pada halaman 45 hingga 46 buku yang sama menggunakan Suku Tengger dari Jawa Timur sebagai satu-satunya contoh komunitas yang disebutkan secara eksplisit. Pemilihan leksikal pada konteks ini juga patut dicatat, istilah "suku dan tradisi" serta "adat-istiadat" digunakan sebagai variabel abstrak tanpa referensi etnonim yang konkret dari luar Jawa, termasuk Kalimantan. Kalimat-kalimat ini terkode sebagai L|D|SL karena menempatkan keragaman kultural sebagai latar analitis yang generik, bukan sebagai subjek historis yang konkret. Sub-bab kearifan lokal pada halaman 70 mengangkat tradisi Sasi dari Maluku dan Papua Barat sebagai contoh tunggal, dengan struktur gramatikal yang menempatkan masyarakat adat sebagai agen pelaku (S|P|SL), pemilihan geografinya tetap mengecualikan Kalimantan Tengah. Komunitas Dayak tidak memperoleh padanan contoh dalam konteks keanekaragaman budaya maupun kearifan lokal sepanjang buku kelas X.

Tabel 2. Hasil Koding Analisis Buku Teks Sejarah Kelas XI dan XII (Safitry et al., 2021; 2022)

No.	Buku	Hal. - Bab/Subbab	Kutipan Verbatim	Koding	Catatan Konteks
1	Kelas XI	Hal. 11 - Bab 1 / Sejarah Regional	"...dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa."	L D SL	Kalimantan sebagai latar geografis perjalanan Varthema, wilayah bukan aktor.
2	Kelas XI	Hal. 30 - Bab 1 / Perlawanan Bangsa Indonesia	"Perlawanan rakyat di Kalimantan dikenal dengan Perang Banjar pada 1859-1905. Pemimpin perlawanan ini yakni Pangeran	S P PK	Satu-satunya narasi perlawanan Kalimantan, Pangeran Antasari disebut namun tanpa

No.	Buku	Hal. - Bab/Subbab	Kutipan Verbatim	Koding	Catatan Konteks
			Antasari yang merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah. Ia berkali-kali memimpin serangan terhadap Belanda."		identifikasi suku/etnis.
3	Kelas XI	Hal. 113 - Bab 3 / Dampak Penjajahan Jepang	"Gambar 3.9. Pembukaan lahan oleh ibu-ibu Fujinkai di Kalimantan."	S D SL	Visual Kalimantan dalam konteks mobilisasi Jepang, tidak ada narasi budaya lokal.
4	Kelas XI	Hal. 137 - Bab 4 / Kekalahan Jepang	"Salah satu pertempuran yang cukup memukul Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan. Tarakan... diserang oleh pihak Sekutu."	L P SL	Kalimantan sebagai latar pertempuran, masyarakat lokal tidak disebut.
5	Kelas XI	Hal. 157-158 - Bab 4 / Sambutan Proklamasi	"...pelaut yang datang dari Jawa ke beberapa pelabuhan seperti Sampit, Pangkalan Bun, Pagatan, Kuala Kapuas, dan Pulang Pisau." / "Di wilayah lain seperti Puruk Cahu... berita proklamasi justru dibawa oleh	O A SL	Wilayah Kalteng sebagai penerima pasif berita, agen penyebar adalah pelaut Jawa dan tentara Australia.

No.	Buku	Hal. - Bab/Subbab	Kutipan Verbatim	Koding	Catatan Konteks
			tentara Australia..."		
6	Kelas XII	Hal. 52 - Bab 1 / Perubahan RIS ke NKRI	"Kalimantan Barat masuk ke dalam negara bagian RI melalui sidang Majelis Permusyawaratan pada 22 April 1950."	S A IN	Entitas politik Kalimantan sebagai subjek integrase, tanpa narasi negosiasi lokal.
7	Kelas XII	Hal. 88 - Bab 2 / Ancaman Disintegrasi	"Di wilayah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar juga ikut bergabung dengan Negara Islam Indonesia..."	S A IN	Tokoh lokal sebagai subjek aktif dalam gerakan nasional, identitas Dayak tidak disebutkan.
8	Kelas XII	Hal. 157 - Bab 4 / Aktivitas Infografik	"Pendidikan: ... SMP 01 Palangkaraya, Kalimantan Tengah; SMA 09, Bandar Lampung."	L D SL	Kalteng sebagai contoh identitas dalam materi poster impian, tidak ada narasi sejarah.

Sumber: Analisis langsung terhadap buku teks (Safitry et al., 2021, 2022)

Referensi Kalimantan yang paling substantif dalam buku kelas XI adalah narasi Perang Banjar pada halaman 30. Analisis linguistik terhadap tiga kalimat tersebut mengungkap dua mekanisme penghilangan yang bekerja secara bersamaan. Pertama, frasa nominalisasi "perlawanan rakyat di Kalimantan" menggunakan denotasi geografis yang kabur, "rakyat" sebagai leksikon generik mengaburkan identitas etnis pelaku perlawanan. Cara teks yang sama memperlakukan



Perang Padri (masyarakat Minangkabau dan Batak) atau Perang Aceh (rakyat Aceh) berbeda secara signifikan karena keduanya menyertakan penanda etnik yang eksplisit. Frasa "rakyat di Kalimantan" tidak menunjukkan komunitas spesifik mana yang menanggung beban perlawanan tersebut. Kedua, kalimat ketiga "Ia berkali-kali memimpin serangan terhadap Belanda" menempatkan Pangeran Antasari sebagai agen militer semata, tanpa menyertakan dimensi identitas kulturalnya sebagai tokoh yang memiliki hubungan erat dengan komunitas adat Dayak, atau konteks perlawanannya atas penghancuran sistem tata kelola adat lokal. Identitas Dayak terhapus secara leksikal dari narasi perlawanan yang seharusnya menjadi momen keagenan historis terpenting komunitas tersebut.

Temuan ini konsisten dengan pola yang diidentifikasi oleh Dhita dan Nofradatu (2021) dalam kajian mereka tentang representasi Kesultanan Palembang, entitas sejarah lokal memperoleh narasi yang lebih lengkap hanya ketika posisinya dikaitkan dengan dinamika kekuasaan pusat atau jaringan perdagangan supra-lokal, bukan berdasarkan otonomi sejarahnya sendiri (Dhita & Nofradatu, 2021). Wilayah-wilayah Kalimantan Tengah seperti Sampit, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Pulang Pisau, dan Puruk Cahu muncul pada halaman 157 hingga 158 buku kelas XI dalam konteks penerimaan berita proklamasi. Struktur sintaksis kalimat-kalimat ini secara konsisten menempatkan wilayah tersebut dalam fungsi objek atau keterangan, bukan subjek gramatikal, agen penyebar berita secara eksplisit adalah "pelaut yang datang dari Jawa" dan "tentara Australia." Konstruksi O|A|SL ini menunjukkan bahwa komunitas Kalimantan Tengah diposisikan sebagai penerima pasif peristiwa nasional yang digerakkan oleh aktor eksternal,

bukan sebagai komunitas yang menghasilkan respons aktif terhadap kemerdekaan.

Ketimpangan Representasi Visual

Inventarisasi elemen visual dari ketiga buku teks menghasilkan temuan yang memperkuat dan melengkapi pola marginalisasi pada level linguistik. Sub-bagian ini merupakan bagian integral dari analisis CDA dimensi pertama (analisis teks), karena representasi visual berfungsi sebagai modalitas semiotik yang bekerja berdampingan dengan teks verbal dalam mengonstruksi makna dan hierarki epistemik (Kress & Van Leeuwen, 2006).

Tabel 3. Distribusi Elemen Visual Berdasarkan Asal Geografis dalam Tiga Buku Teks Sejarah

Asal Geografis Konten Visual	Jumlah Elemen (Kelas X)	Jumlah Elemen (Kelas XI)	Jumlah Elemen (Kelas XII)
Jawa (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dll.)	6 dari 10 (60%)	5 dari 10 (50%)	4 dari 11 (36%)
Luar Jawa (bukan Kalimantan)	4 dari 10 (40%)	3 dari 10 (30%)	6 dari 11 (55%)
Kalimantan (termasuk Kalteng)	0 dari 10 (0%)	2 dari 10 (20%)	1 dari 11 (9%)
Budaya Spesifik Dayak	0	0	0

Sumber: Inventarisasi penulis dari buku teks Kelas X, XI, dan XII, 2026.

Buku kelas X tidak memuat satu pun elemen visual berlatar Kalimantan dari sepuluh gambar yang teridentifikasi. Buku kelas XI memuat dua elemen visual berlatar Kalimantan (20%), namun keduanya merepresentasikan Kalimantan dalam konteks mobilisasi dan penderitaan masa perang, bukan dalam konteks budaya atau identitas komunitas lokal, foto pembukaan lahan oleh Fujinkai pada halaman 113



dan foto pengungsi di Tarakan pada halaman 137. Buku kelas XII memuat satu elemen visual berlatar Kalimantan (9%), berupa poster impian masa depan siswa dari SMP 01 Palangkaraya, yang merupakan elemen pedagogis dan bukan historis. Tidak ditemukan satu pun elemen visual yang menampilkan budaya spesifik Dayak di ketiga buku teks, tidak ada foto rumah betang, tidak ada ilustrasi ritual tiwah, dan tidak ada gambar kearifan lokal Dayak dalam bentuk apa pun.

Ketiadaan representasi visual budaya Dayak ini relevan dalam kerangka teori *hidden curriculum*, representasi visual tidak hanya berfungsi dekoratif, melainkan secara aktif melegitimasi hierarki epistemik tertentu dengan mengasosiasikan keagungan, kemajuan, dan historisitas secara visual. Warisan visual budaya Dayak Kalimantan Tengah, yang mencakup arsitektur rumah betang, artefak ritual tiwah, dan manuskrip sastra karungut, memiliki nilai historis dan epistemik yang substansial (Armando, 2021; Ningrum & Soebijantoro, 2023; Sintia & Misrita, 2026). Ketika warisan tersebut tidak hadir dalam representasi visual buku teks nasional, pesan implisit yang tersampaikan kepada siswa adalah bahwa budaya tersebut tidak memiliki nilai historis yang layak untuk dicatat.

Pola Wacana Ideologis dalam Representasi Kalimantan

Pertanyaan penelitian kedua tentang pola wacana ideologis dijawab melalui analisis pada level meso dan makro, yang mengidentifikasi tiga mekanisme diskursif bekerja secara konsisten lintas tiga domain tematik, keanekaragaman budaya, perlawanan kolonialisme, dan integrasi nasional.

Tabel 4. Distribusi Tematik Referensi Kalimantan Tengah Dalam Buku Teks Sejarah Nasional

No.	Konteks Kemunculan	Posisi Naratif	Frekuensi Relatif*	Implikasi Epistemik
1	Bab Keanekaragaman Budaya Nasional (KB)	Latar Belakang (L)	Tinggi	Kalimantan hadir sebagai bagian dari keragaman Indonesia namun tanpa narasi keagenan historis yang spesifik.
2	Bab Perlawanan terhadap Kolonialisme (PK)	Subjek Parsial (S)	Sangat Rendah	Hanya satu narasi perlawanan (Perang Banjar/Pangeran Antasari) tanpa identifikasi etnis Dayak secara eksplisit.
3	Bab Pembentukan NKRI / Integrasi Nasional (IN)	Konteks Geografis	Rendah-Sedang	Kalimantan hadir sebagai wilayah administratif yang bergabung, bukan sebagai partisipan aktif yang menegosiasikan identitasnya.
4	Bab Sejarah Lokal / Studi Kasus Regional (SL)	Subjek Lokal (S)	Rendah-Sedang	Kemunculan terbatas pada keterangan gambar atau referensi geografis tanpa narasi kebudayaan Dayak secara eksplisit.

Sumber: Kompilasi penulis dari analisis literature, 2026.

Mekanisme Pertama: Konstruksi Ruang Penyerta dalam Domain Keanekaragaman Budaya

beroperasi paling halus namun paling konsisten. Buku kelas X menyajikan konsep keragaman melalui bab berpikir sinkronis (halaman 45-46) dengan menggunakan leksikon "budaya, suku dan tradisi" serta "adat-istiadat" sebagai variabel analitis yang generik. Tidak satu pun contoh konkret dari Kalimantan disertakan dalam konteks ini. Satu-satunya contoh komunitas yang disebutkan secara eksplisit adalah Suku Tengger dari Jawa Timur (halaman 36). Pola ini mencerminkan mekanisme konstruksi ruang penyerta, Kalimantan dan komunitas



Dayak memperoleh signifikansi naratif hanya sejauh mereka dapat berfungsi sebagai pelengkap narasi yang berpusat di Jawa, bukan sebagai subjek historis otonom.

Mekanisme ini semakin jelas apabila dibandingkan dengan penanganan kearifan lokal dalam sub-bab yang sama. Sub-bab kisah inspiratif tradisi Sasi (halaman 70) akhirnya menampilkan masyarakat adat sebagai subjek aktif, tetapi wilayah yang dipilih adalah Maluku dan Papua Barat. Praktik ekologi tradisional masyarakat Dayak Ngaju dalam pengelolaan kawasan hutan dan sungai memiliki kompleksitas dan relevansi pedagogis yang setara dengan tradisi Sasi (Usop, 2020), tetapi tidak memperoleh tempat dalam narasi. Ketiadaan ini bukan keterbatasan ruang halaman, melainkan pilihan kurikuler yang memiliki konsekuensi epistemik, siswa yang membaca buku ini memperoleh pesan implisit bahwa kearifan lokal yang layak dijadikan contoh nasional tidak berasal dari Kalimantan.

Mekanisme Kedua: Modalitas Minimisasi dalam Domain Perlawanan Kolonialisme

Narasi perlawanan komunitas di luar Jawa disertai konstruksi yang secara implisit mengecilkan bobotnya. Perbandingan yang mencolok dapat dilihat pada cara buku kelas XI memperlakukan Perang Banjar, dua kalimat ringkas pada halaman 30, dibandingkan dengan narasi perlawanan Pangeran Diponegoro yang memperoleh beberapa halaman lengkap dengan ilustrasi dan kontekstualisasi yang terperinci. Penggunaan modalitas minimisasi (Suharya, 2020) ini tidak hanya terlihat pada alokasi spasial, tetapi juga pada pilihan leksikal, Perang Diponegoro dikontekstualisasikan sebagai momen kebangkitan nasional dengan resonansi ideologis yang luas, sementara Perang Banjar disajikan sebagai peristiwa regional yang terisolasi. Ketimpangan alokasi naratif ini



merupakan mekanisme diskursif yang secara implisit memvalidasi hierarki signifikansi historis antara Jawa sebagai pusat peradaban dan Kalimantan sebagai wilayah pinggiran..

Mekanisme Ketiga: Praanggapan Integrasi Tanpa Negosiasi dalam Domain Integrasi Nasional

Bab-bab tentang pembentukan NKRI dalam buku kelas XII secara konsisten memposisikan integrasi ke dalam negara Indonesia sebagai tujuan yang diinginkan oleh seluruh komunitas etnik, tanpa mengeksplorasi kompleksitas negosiasi identitas dan otonomi yang sesungguhnya terjadi. Pernyataan "Kalimantan Barat masuk ke dalam negara bagian RI melalui sidang Majelis Permusyawaratan pada 22 April 1950" pada halaman 52 memperlakukan integrasi sebagai proses teknis-administratif semata. Secara gramatikal, konstruksi kalimat ini menggunakan verba intransitif "masuk" dengan Kalimantan Barat sebagai subjek, yang menyiratkan bahwa integrasi adalah tindakan sukarela dan tanpa tegangan. Praanggapan ini menempatkan komunitas Dayak secara pasif sebagai penerima integrasi, bukan sebagai agen yang menegosiasikan posisi mereka dalam negara bangsa yang baru (Lanjani et al., 2025).

Implikasi Epistemik dan Rekomendasi Reformasi Kurikulum

Pola representasi yang ditemukan, yang mencakup ketiadaan absolut istilah etnik, penghapusan identitas dalam narasi perlawanan, pengecualian dari domain keanekaragaman budaya, serta ketiadaan representasi visual, memiliki implikasi epistemik yang serius dan saling terkait dalam menjawab pertanyaan penelitian ketiga.

Kerangka Fricker (2007) memungkinkan kondisi yang terjadi dikualifikasikan sebagai *hermeneutical injustice* (Fricker, 2007), siswa Dayak tidak memiliki sumber daya hermeneutik yang memadai dalam kurikulum formal untuk memahami dan mengekspresikan pengalaman



historis komunitas mereka. Ini bukan sekadar persoalan afektif, melainkan persoalan epistemik yang fundamental. Susanto dan Purwanta (2022) menunjukkan bahwa pencapaian empati historis, yakni salah satu tujuan fundamental pendidikan sejarah, bergantung pada kemampuan siswa untuk mengidentifikasi diri dengan subjek-subjek dalam narasi sejarah (H. Susanto & Purwanta, 2022). Siswa yang tidak pernah menemukan cerminan komunitas mereka sebagai subjek historis yang aktif dan bermartabat dalam kurikulum formal menghadapi hambatan struktural dalam mengembangkan empati historis yang bermakna.

Implikasi tersebut tidak hanya menyentuh siswa Dayak secara individual. Ketiadaan perspektif Dayak dari kurikulum juga merupakan kerugian epistemik bagi seluruh siswa Indonesia karena mereka kehilangan kesempatan memahami Indonesia dalam keberagaman epistemologinya.

Analisis triangulasi dengan sumber historiografi lokal menunjukkan luasnya kesenjangan antara apa yang tersedia secara akademis dan apa yang termuat dalam kurikulum. Setidaknya tiga dimensi historiografi Dayak memiliki potensi pedagogis yang konsisten terabaikan. Pertama, dari dimensi hukum dan tata kelola, sistem hukum adat Dayak Ngaju mencakup mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan pranata sosial yang telah beroperasi jauh sebelum pembentukan negara modern Indonesia (Suryanto, 2024; Yuliyanto, 2017). Kedua, dari dimensi sejarah politik, Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 adalah peristiwa di mana komunitas Dayak melakukan reformasi sosial secara internal melalui mekanisme konsensus, yakni bukti nyata kapasitas otonom komunitas tersebut yang sama sekali tidak tercatat dalam ketiga buku teks. Susanto dan



Andayani (2023) telah membuktikan secara empiris bahwa pengembangan buku digital berbasis peristiwa ini meningkatkan kesadaran sejarah mahasiswa secara terukur (Y. Susanto & Andayani, 2023). Ketiga, dari dimensi ekologi dan kosmologi, hubungan masyarakat Dayak Ngaju dengan Sungai Kahayan dan ritual tiwah merupakan sistem pengetahuan tentang kehidupan, kematian, dan kosmologi yang kompleksitasnya setara dengan sistem kepercayaan yang umumnya mendapat tempat dalam kurikulum sejarah nasional (Ningrum & Soebijantoro, 2023; Usop, 2020). Ketiga dimensi ini secara langsung relevan untuk mengisi celah yang diidentifikasi, kearifan ekologis Dayak untuk domain keanekaragaman budaya, Rapat Tumbang Anoi untuk domain perlawanan dan kemandirian, serta sistem hukum adat untuk domain integrasi nasional yang melampaui narasi administratif.

Kurikulum Merdeka membuka peluang struktural yang lebih besar dibanding Kurikulum 2013 melalui mekanisme muatan lokal dan fleksibilitas modul ajar. Kurniawan (2021) menegaskan bahwa paradigma Merdeka Belajar secara prinsipil memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan konten berbasis konteks lokal (Kurniawan, 2021). Guru sejarah di Kalimantan Tengah menghadapi tiga kendala struktural yang konkret, kendala waktu akibat tekanan penyelesaian materi nasional yang padat, kendala sumber daya akibat ketiadaan bahan ajar sejarah Dayak yang terstandarisasi, dan kendala kompetensi akibat kurikulum pendidikan guru yang umumnya tidak menyertakan historiografi lokal (Forwanto, 2021; Injili & Susanto, 2025; Isabella et al., 2025). Peluang kebijakan yang ada bersifat *de jure*, sementara kendala tersebut bersifat *de facto*, solusi yang diperlukan harus menjembatani keduanya melalui

intervensi yang bersifat sistemik-kurikuler, bukan sekadar individual-pedagogis.

Penelitian ini merumuskan rekomendasi pada empat dimensi intervensi yang masing-masing berakar langsung pada kesenjangan empiris yang diidentifikasi.

Tabel 5. Kerangka Rekomendasi Kebijakan Integrasi Historiografi Dayak dalam Kurikulum Nasional

Dimensi Intervensi	Rekomendasi Spesifik	Mekanisme Implementasi	Landasan Kebijakan
Kurikulum Formal	Integrasi wajib modul sejarah Dayak dalam Capaian Pembelajaran Sejarah Indonesia kelas X–XII sebagai subjek historis otonom, bukan pelengkap budaya	Revisi Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudris tek	Permendikbud No. 16/2022 tentang Standar Proses, Permendikbud No. 7/2022 tentang Standar Isi
Muatan Lokal	Pengembangan modul digital interaktif berbasis peristiwa signifikan, Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, sistem hukum adat Dayak Ngaju, dan tokoh sejarah lokal Kalimantan Tengah	Kerjasama Dinas Pendidikan Kalteng, MGMP Sejarah, dan perguruan tinggi lokal	Pasal 77N PP 57/2021 tentang muatan lokal wajib di daerah
Literasi Guru	Program literasi historiografi lokal bagi guru sejarah SMA/SMK se-Kalimantan Tengah, termasuk pelatihan analisis sumber primer arsip adat	Kolaborasi P4TK IPS dan perguruan tinggi lokal melalui program pelatihan berkelanjutan	Permendikbud No. 6/2018 tentang Penugasan Guru
Akses Sumber	Digitalisasi arsip adat, naskah karungut, dan dokumentasi ritual tiwah sebagai sumber belajar terbuka (open educational resources)	Kolaborasi Dinas Kebudayaan, ANRI regional, dan perguruan tinggi lokal	UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan analisis kebijakan dan literatur pendidikan sejarah, 2026.



Kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Sebagai analisis dokumen, penelitian ini tidak dapat menangkap variasi implementasi kurikulum yang terjadi di tingkat kelas. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mencakup studi fenomenologis tentang pengalaman alienasi historis siswa Dayak di Kalimantan Tengah, analisis perbandingan buku teks sejarah lokal muatan Kalimantan Tengah dengan buku teks nasional, serta pengembangan dan uji coba modul digital interaktif sejarah Dayak berbasis Kurikulum Merdeka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa representasi sejarah Dayak Kalimantan Tengah dalam tiga buku teks Sejarah Indonesia Kemendikbudristek untuk kelas X, XI, dan XII, yang merupakan buku teks resmi Kurikulum Merdeka, bersifat fragmentaris dan secara struktural diposisikan sebagai objek budaya, bukan sebagai subjek historis yang otonom. Temuan yang paling konkret adalah ketiadaan total kata "Dayak" dari ketiga buku teks, suatu ketiadaan yang bersifat absolut dan terverifikasi secara empiris melalui penelusuran sistematis. Kalimantan hanya hadir sebagai latar geografis, penerima pasif peristiwa nasional, atau referensi wilayah administratif, tidak pernah sebagai komunitas dengan sejarah, sistem hukum, dan sistem pengetahuan yang otonom. Pola tersebut menghasilkan kondisi yang dalam kerangka Fricker (2007) dapat dikualifikasikan sebagai *hermeneutical injustice*. Ketimpangan representasi yang ditemukan bukan sekadar kesalahan konten, melainkan mencerminkan ketidakadilan struktural dalam produksi pengetahuan sejarah yang memerlukan intervensi sistemik pada dimensi kurikulum formal, muatan lokal, literasi guru, dan akses sumber secara bersamaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum* (3rd ed.). *Routledge*.
- Armando, R. (2021). Jejak Sejarah Dalam Sastra Lisan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Preprints*, 1–9. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9b5jm>
- Azifambayunasti, A., Warto, & Yamtinah, S. (2022). Where's the role of women under the Indonesian revolutionary era on textbook? A text analysis of chapter 7 Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI. *International Journal of Education and Social Science Research*, 5(5), 402–414. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2022.5522>
- Baddak, K. V, Yustha, Y., & Manya, M. (2019). Studi Pemanfaatan Huma Betang Tumbang Anoi sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal di Kalimantan Tengah. *Anterior Jurnal*, 19(1), 56–68. <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i1.1169>
- Bhaskara, P. E. I. (2024). Analisis Materi Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Pada Mata Pelajaran IPS. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 151–156. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v5i2.4084>
- Chalimi, I. R. (2024). Problematika Pembelajaran Bermuatan Materi Sejarah Lokal. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2 SE-Articles), 2091–2102. <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/27454312.432>
- Darmawan, S. I. W., & Mulyana, A. (2019). A history and ideology in the development of the writing of history textbooks for high school in Indonesia 1994-2013. *Historia*, 3(1), 43–48. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i1.20991>
- Dhita, A. N., & Nofradatu, S. (2021). Jalan menuju kelahiran Kesultanan Palembang (1675). *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 2(1), 149–161. <https://doi.org/10.30998/je.v2i1.598>
- Fauzan, R. (2018). Implementasi Materi Sejarah Lokal Gerakan Sosial Messianistik Dan Nativisme Di Banten Melalui Pendekatan Saintifik Dalam Kurikulum Nasional. *Historia Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 25. <https://doi.org/10.17509/historia.v1i2.10903>
- Forwanto, E. (2021). Nilai Tari Kinyah Mandau dalam kepemimpinan



- pemerintahan di Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.37304/jispar.v5i1.392>
- Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, 1–208. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>
- Gemilang, G. F., Darmawan, W., & Winarti, M. (2024). Jawasentris dalam wacana buku teks sejarah Indonesia. *Historia*, 7(1), 51–60. <https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.50815>
- Hartati, E. (2018). Pembelajaran Sejarah Indonesia Berbasis Peristiwa-Peristiwa Lokal Di Kalimantan Tengah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 9(1), 39–50. <https://doi.org/10.37304/jikt.v9i1.5>
- Injili, P. O., & Susanto, Y. (2025). Analysis of the Regional Warrior Figure Christoffel Binti as a Teaching Material for History of Heroism Material for Class XI MIPA 8 Students at SMA Negeri 2 Palangka Raya. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 10(2), 422–435. <https://doi.org/10.24815/jimps.v10i2.33144>
- Isabella, Susanto, Y., & Sumiatie. (2025). Development of Audio-Visual Learning Media on Local Historical Figure Hausman Baboe of Central Kalimantan. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 21(2). <https://doi.org/10.21831/istoria.v21i2.89345>
- Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2006). *Reading images: The grammar of visual design*. Routledge.
- Kristianus, K. (2022). The effect of Catholic religion on Dayak identity in West Kalimantan. *International Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v5i1.3124>
- Kurniawan, H. (2021). Paradigma Baru Pendidikan Dan Pembelajaran Sejarah Dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.17977/um0330v4i2p128-142>
- Laksitanto, V., & Pelu, M. (2026). Narasi wacana multikultural dalam buku teks sejarah kelas XI kurikulum merdeka. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 16, 28–42. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v16i1.23373>
- Lanjani, Y., Wibowo, B., & Rivasintha, E. (2025). Sejarah Pengawasan Pemilihan Umum di Kalimantan Barat (1999–2023). *Journal of Sciences & Humanities "ESTORIA"*, 6(1), 914–923. <https://doi.org/10.30998/je.v6i1.3171>



- Maksum, A. (2015). Interpretasi Sejarah Sebagai Peristiwa Dan Masalah Pendidikan. *At-Turats*, 9(2), 3–16. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v9i2.312>
- Ningrum, D. A. M., & Soebijantoro, S. (2023). Makna simbolik ritual tiwah suku dayak ngaju sebagai sumber belajar sejarah lokal di Kalimantan Tengah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 13(1), 90–99. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v13i1.14959>
- Oktafiana, S. (2021). *Sejarah untuk SMK Kelas X (Edisi Revisi)*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Purwanta, H. (2012). *Buku teks pelajaran sejarah SMA: Analisis isi dan wacana nasionalisme*. Ombak.
- Purwanta, H. (2023). Indonesian secondary history literacy skills level: Case study of public and private high schools in Sukoharjo Regency, Central Java. *Multidisciplinary Science Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2023050>
- Rahmadani, D., & Aisiah, A. (2024). Analisis keterwakilan tokoh sejarah tiap daerah dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka untuk kelas XI SMA/SMK. *Jurnal Kronologi*, 5(4). <https://doi.org/10.24036/jk.v5i4.779>
- Safitry, M., Utami, I. W. P., & Ilyas, Z. (2021). *Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Safitry, M., Utami, I. W. P., & Ratmanto, A. (2022). *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Silva, E. A. D., & Silva, R. D. S. P. T. (2025). Saberes que resistem: Povos indígenas e a luta pela representações indígenas nos livros didáticos de história. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, 18(9), e20868. <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.9-202>
- Sintia, D., & Misrita. (2026). Manuskrip Tambun Bungai sebagai arsip sastra tradisional Dayak: Analisis isi dan fungsi sosial budaya. *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, 5(2), 227–243. <https://doi.org/10.21009/Arif.052.04>
- Suharya, T. (2020). Meluruskan Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia: Suatu Kajian Terhadap Buku Teks Pelajaran Sejarah.



Chronologia, 2(2), 39–46. <https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.6107>

- Suryanto, D. (2024). Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kalimantan Tengah. *Vyavahara Duta*, 19(1), 68–76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>
- Susanto, H., & Purwanta, Hieronymus. (2022). Analisis Pola Narasi Reflektif Buku Teks Sejarah SMA Untuk Pencapaian Empati Sejarah. *Yupa Historical Studies Journal*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i1.1066>
- Susanto, Y., & Andayani, E. S. (2023). Pengembangan Buku Digital Sejarah Lokal: Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 Untuk Meningkatkan Kesadaran Sejarah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palangka Raya. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.17977/um0330v6i1p117-131>
- Syahrman, A., & Mulyana, A. (2021). Multikulturalisme: Analisis Wacana Buku Teks Pelajaran Sejarah. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 2(1), 17–31. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v2i1.22>
- Usop, L. S. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Untuk Melestarikan Pahewan (Hutan Suci) Di Kalimantan Tengah. *Enggang Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra Seni Dan Budaya*, 1(1), 89–95. <https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.2465>
- Wurdianto, K., Norsandi, D., & Fitriana, E. (2022). Etnopedagogi Batang Garing suku Dayak Ngaju sebagai nilai pendidikan karakter peduli lingkungan. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikultural*, 4(3), 145–158. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.1936>
- Yuliyanto, Y. (2017). Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134>